
***Balance of Power* Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Melalui Pakta AUKUS**

Ida Ayu Gayatri Indah Puspa Sari¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan upaya *balance of power* Amerika Serikat terhadap Tiongkok dengan menggunakan AUKUS sebagai *eksternal balancing* (*Alliance*). Pembentukan aliansi pertahanan bersama dengan Australia dan Inggris menjadi upaya Amerika Serikat dalam meningkatkan kekuatannya di kawasan Indo-Pasifik. Analisis ini dilakukan secara kualitatif menggunakan teori *balance of power* dan konsep aliansi untuk menjelaskan perimbangan kekuatan yang dilakukan AS. Latar belakang perilaku Amerika Serikat tersebut didasarkan pada kekhawatirannya terhadap kebangkitan dan perkembangan kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok yang sangat masif, khususnya di persimpangan Indo-Pasifik. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti mengidentifikasi temuan mengenai beberapa strategi yang dilakukan Amerika Serikat melalui AUKUS dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik sekaligus sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok, antara lain: AUKUS sebagai strategi Amerika Serikat untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan militer, pemberian teknologi nuklir untuk Australia yang digunakan sebagai pengembangan kapal selam, AUKUS digunakan sebagai kontributor pendukung perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, serta penguatan industri kapal selam Amerika.

Kata-kunci : Amerika Serikat, Balance of Power, External Balancing, Tiongkok

Abstract

This research aims to elucidate the United States' efforts in balancing power against China by utilizing AUKUS as external balancing (Alliance). The formation of a joint defense alliance with Australia and the United Kingdom represents the United States' endeavor to bolster its strength in the Indo-Pacific region. The analysis is conducted qualitatively employing the balance of power theory and alliance concepts to explicate the power dynamics executed by the US. The background of this US behavior is rooted in its concerns regarding the substantial rise and advancement of China's military and economic prowess, particularly in the Indo-Pacific nexus. Based on the analysis findings, the researcher identifies several strategies employed by the United States through AUKUS to maintain its influence in the Indo-Pacific region while serving as a counterbalance to China, including: utilizing AUKUS as a strategy for the United States to enhance its military strength and capability, providing nuclear technology to Australia for submarine development, utilizing AUKUS as a contributor to peace and stability in the Indo-Pacific region, and strengthening the American submarine industries.

Keywords : United States, Balance of Power, External Balancing, China.

Kontak Penulis

Ida Ayu Gayatri Indah Puspa Sari

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat : Jalan PB. Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 361 2553 78 Fax: +62 361 2559 16

E-mail : dayugayatri.dg.dg@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini, kawasan Indo-Pasifik yang membentang dari benua Asia hingga Amerika, dan berbatasan langsung dengan dua samudera (Pasifik & Hindia), telah menjadi fokus utama dalam konteks keamanan dan ekonomi global. Indo-Pasifik dianggap sebagai pusat gravitasi ekonomi dan keamanan global yang menarik perhatian untuk meningkatkan konektivitas, kemajuan ekonomi, dan keamanan. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Dinamika internasional mengalami banyak perkembangan yang disebabkan oleh perubahan pola hubungan antarnegara karena beragamnya kepentingan nasional tiap negara. Pola interaksi yang terbentuk dalam dunia internasional memunculkan sebuah sistem yang mencerminkan keadaan dunia.

Kebangkitan Tiongkok menjadi salah satu tanda mulai terciptanya tatanan multipolar di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok secara bertahap mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan peningkatan kapabilitas militer mereka. Perkembangan ini menandakan bahwa Tiongkok adalah negara yang memiliki *potential power* yang semakin berkembang di berbagai bidang, baik itu ekonomi, teknologi, militer, dan politik. Menurut laporan *Regional Response to US-China competition in the Indo-Pacific* (2020), faktor ekonomi menjadi poin awal berkembangnya kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Situasi ini dapat dilihat dari ketergantungan ekonomi yang terbentuk saat ini.

Dengan meningkatnya kapabilitas dan interaksi Tiongkok di Indo-Pasifik, menimbulkan kegelisahan bagi Amerika Serikat sebagai negara yang masih ingin menjaga kekuatannya di kawasan tersebut. Sehingga peran Amerika Serikat ditentukan dari bagaimana responnya terhadap kebangkitan Tiongkok. Hingga saat ini

Tiongkok telah meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi dengan beberapa negara di Indo-Pasifik, seperti Jepang, Korea, Australia dan negara anggota ASEAN. Tiongkok juga membangun fasilitas keamanan di sekitar Laut Tiongkok Selatan (LTS) tepatnya di kepulauan Spratly yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi kehadiran pasukan militer (Prayoga, 2021). Dalam upaya menghadapi pergeseran kekuatan ini, Amerika Serikat merespon dengan meningkatkan kekuatan militernya melalui pembentuk pakta pertahanan trilateral AUKUS bersama dengan Inggris dan Australia sebagai sekutunya. Pakta ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama militer, menjaga keamanan, stabilitas, dan perdamaian kawasan melalui pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

Penelitian ini menggunakan tiga literatur sebagai landasan. Literatur pertama, karya Angga Nurdin Rachmat (2017), menyoroti persaingan antara kedua kekuatan tersebut, menggambarkan bagaimana Tiongkok dan Amerika Serikat saling bersaing untuk mempertahankan dominasi mereka di kawasan. Literatur kedua oleh M Najeri Al Syahrin (2018), mengeksplorasi dampak kehadiran Tiongkok dalam persaingan keamanan di Asia Pasifik, menyoroti bagaimana Tiongkok menjadi pusat baru dalam kawasan tersebut dan menantang kepentingan nasional Amerika Serikat. Sementara itu, literatur ketiga dari Paul Corish (2021) membahas keterlibatan Inggris dalam pakta trilateral AUKUS dan implikasinya terhadap kepentingan nasional Inggris serta hubungan dengan Tiongkok. Secara keseluruhan, karya-karya tersebut menyoroti pentingnya memahami dinamika keamanan regional dan peran masing-masing negara dalam menghadapi tantangan keamanan.

Selanjutnya, penulis akan menggunakan teori *Balance of Power* dan konsep Aliansi untuk menganalisis isu rivalitas yang

terjadi di Indo-Pasifik. Kajian *balance of power* mengidentifikasi negara sebagai aktor utama (Waltz, 1978), sehingga negara dapat bertindak dan menggunakan berbagai cara untuk melindungi serta mencapai tujuannya. Waltz menyampaikan terdapat dua jenis *balancing*, yaitu *external* dan *internal*. Penyeimbang eksternal mengacu pada upaya menghadapi ancaman dengan menjalin, memperkuat dan memperbesar aliansi dengan tujuan mengecilkan aliansi kekuatan lawan. Sedangkan penyeimbang internal dilakukan melalui mobilisasi militer, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapabilitas militer, serta penggunaan strategi dan pengaruh politik.

Martin Wight (1966) menjabarkan sembilan pemaknaan akan *balance of power*, yakni: 1) adanya sebuah distribusi kekuatan; 2) prinsip bahwa kekuatan harus dibagikan secara merata; 3) eksistensi dari pendistribusian kekuatan; 4) prinsip pengembangan kekuatan oleh negara adidaya dengan mengorbankan yang lemah; 5) prinsip adanya sebuah margin kekuatan untuk mencegah adanya ketidakmerataan distribusi kekuasaan; 6) memiliki peran khusus dalam menjaga pemerataan kekuasaan; 7) keuntungan yang spesial dalam adanya pendistribusian kekuatan; 8) dominasi kekuatan; serta 9) adanya kecenderungan dalam politik internasional untuk menghasilkan sebuah upaya penyeragaman kekuatan.

Sedangkan konsep Aliansi menurut Walt (1985), merupakan hubungan kerja sama keamanan dari dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam menghadapi ancaman. Mereka didasarkan pada rasionalitas strategis, yang menyatukan sarana militer dan tujuan politik. Walt juga menekankan bahwa aliansi merupakan respon dari kekhawatiran keamanan, dan aliansi ini melibatkan sejumlah negara yang bertindak bersama-sama pada waktu tertentu untuk

saling meningkatkan keamanan militer para anggotanya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk menjelaskan awalan terbentuknya pakta pertahanan AUKUS bersama dengan tiga negara pendirinya. Sumber data yang digunakan adalah bersifat kepustakaan. Data diperoleh melalui media daring yang membahas latar belakang terbentuknya pakta AUKUS dan tujuan Amerika Serikat dalam membentuk pakta ini. Beberapa sumber data utama yang digunakan, antara lain buku dari Kenneth Waltz yang berjudul *Theory of International Politics* (1979), Herbert Butterfield dan Martin Wight yang berjudul *Diplomatic investigations: Essays in the theory of international politics* (1966), Sorensen yang berjudul *Introduction to International Relation* (2013) dan Andrew Heywood (2013) yang berjudul *Global politics*. Unit analisisnya adalah negara, karena fokus utama penelitian adalah interaksi antarnegara di kawasan Indo-Pasifik. Dalam menganalisis data, penulis menerapkan teknik penjabaran yang dimulai dengan kondensasi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Data hasil disajikan secara sistematis dengan menarasikannya dalam bentuk naratif, yang didasarkan atas kerangka pemikiran mengenai keterkaitan antara konsep *Balance of Power* dan Aliansi, sehingga pembaca dapat melihat dan memahami apa kepentingan Amerika Serikat dalam membentuk pakta pertahanan AUKUS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebangkitan Kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik

Pasca berakhirnya perang dingin, Tiongkok sebagai sekutu Uni Soviet mengalami banyak kesulitan. Para pemimpin Tiongkok masih berusaha untuk memperkuat pondasi

negara dan politik luar negerinya. Melihat kembali sisi sejarah Tiongkok, negara ini memiliki sebuah tujuan yaitu *Chinese Dream*. "*Chinese Dream*" merupakan sebuah konsep yang telah lama dicetuskan oleh para pemimpin terdahulu yang menginginkan Tiongkok memimpin dunia dengan pondasi kekuatan ekonomi dan militer (Mingfu, 2015). Dibawah masa pemerintahan Presiden Xi Jinping, *Chinese Dream* diimplementasikan menjadi tiga bagian kebijakan, yaitu sektor ekonomi, sektor politik, serta keamanan dan militer. Berbekal semangat *Chinese Dream*, Tiongkok berupaya meningkatkan kemampuan negaranya.

Kebangkitan ekonomi Tiongkok meningkat bersamaan dengan inisiasi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang berimplikasi langsung dengan pertumbuhan perekonomian negara. Dalam bidang keamanan, anggaran belanja militer Tiongkok pertahun 2021 menunjukkan angka USD 285 miliar, dan tahun 2022 meningkat menjadi USD 292 miliar. Berdasarkan dokumen *China's National Defense* (2008), meningkatnya anggaran pertahanan militer Tiongkok memiliki kesinambungan antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan ekonomi, yang peningkatannya selaras dengan kebutuhan militernya di masa depan yang mengutamakan efisiensi dan modernisasi. Peningkatan anggaran negara dalam membeli perlengkapan militer ini berkaitan dengan posisi keamanan negaranya di kawasan Indo-Pasifik. Namun meningkatnya anggaran belanja militer Tiongkok juga dapat menjadi ancaman bagi negara di sekitar kawasan. Ditambah Tiongkok telah rampung menyelesaikan pembangunan infrastruktur di pesisir kepulauan Spratly.

Keberhasilan Tiongkok dalam membangun dominasi yang terjadi di LTS dinilai dapat menguntungkan dalam hal pembangunan dan juga mengonsolidasikan sentralitasnya di Asia (Raditio, 2019: 77). Meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-pasifik dapat menjadi ancaman yang menggoyahkan dominasi Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Kondisi ini dapat dikatakan

mengancam bagi Amerika Serikat karena, Jika Tiongkok terus mengupayakan untuk menjadi negara yang menguasai kawasan Indo-pasifik maka hal ini akan memengaruhi stabilitas dan pola geopolitik global.

Dominasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan dalam kawasan, baik Amerika dan Tiongkok melihat bahwa titik persimpangan yang berada di Indo-Pasifik, yaitu jalur perairan LTS adalah wilayah laut yang perlu diperhatikan, karena posisi wilayah laut yang strategis dan letaknya di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik membuat banyak kapal sering melalui LTS. Beragam sumber daya alam seperti cadangan gas alam, minyak bumi, mineral, dan kekayaan hayati di kawasan LTS (CNBC, 2020) membuat kedua negara berusaha mempertahankan pengaruhnya pada kawasan ini. Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan militer dengan mengarahkan pasukan ke Darwin, Australia, memperluas kerja sama militer dengan Malaysia, Singapura, Thailand, serta mengaktifkan kembali kerja sama keamanan dengan Vietnam dan Filipina. Hal ini dilakukan guna membendung pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik, agar tidak terbentuk hegemoni tunggal di kawasan Indo-pasifik

Keamanan Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik memiliki berbagai isu keamanan yang dapat menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitarnya, seperti sengketa kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Laut Tiongkok Timur (LTT), kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, Pakistan, India, Cina, Rusia, dan Australia, konflik dalam negeri di Myanmar, perang di Semenanjung Korea, terorisme, keamanan maritim dan perubahan iklim. Isu keamanan di LTS timbul akibat pembelaan yang dilakukan Tiongkok, atas klaim "*Nine Dash Line*" yang menunjukkan garis batas teritorial Tiongkok berdasar historis terdahulu, sehingga membuat masifnya peningkatan kekuatan Tiongkok di

persimpangan kawasan Indo-Pasifik. Munculnya berbagai isu keamanan menyebabkan kawasan ini sering menjadi arena bagi banyak negara untuk bisa menguasai dan memiliki pengaruh yang besar di Indo-Pasifik.

Membahas kawasan Indo-Pasifik tentu tidak asing akan rivalitas kekuasaan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kedua negara saling melebarkan pengaruhnya sebagai dampak dari adanya multilateralisme kawasan. Meningkatnya ketertarikan AS akan kawasan ini utamanya pada persimpangan LTS, yang disebabkan klaim wilayah secara sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. AS memandang bahwa klaim wilayah ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak mematuhi hukum laut internasional (UNCLOS). Selain itu LTS termasuk dalam jalur perdagangan utama dunia. AS melihat peluang bahwa Indo-Pasifik termasuk kawasan yang potensial secara geografis dan sumber alam, yang seluruh aktifitas yang terjadi di sana memiliki signifikansi langsung pada stabilitas dan perekonomian global. Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk aliansi keamanan AUKUS sebagai usaha untuk menekan kekuatan Tiongkok.

Treaty Defence Partnership AUKUS 2021

Pakta pertahanan trilateral AUKUS, merupakan kemitraan atau kerja sama keamanan yang diratifikasi pada 15 September 2021 oleh tiga negara, yaitu Australia, Inggris, Amerika Serikat. AUKUS merupakan singkatan dari negara-negara yang tergabung di dalamnya (Australia, United Kingdom dan United State). AUKUS dibentuk Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris untuk menciptakan, keamanan dan kestabilan kawasan Indo-Pasifik, demi kepentingan keamanan dan pertahanan satu sama lain. Amerika Serikat dan Inggris sepakat untuk bersama meningkatkan kekuatan militer

Australia melalui pembentukan kapal selam bertenaga nuklir, yang dilengkapi dengan kemampuan pertahanan bawah laut, kemampuan kecerdasan buatan, keamanan siber, dan teknologi kuantum dengan tujuan meningkatkan kerja sama diplomatik, keamanan, serta pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Terbentuknya trilateral AUKUS dapat dikatakan sebagai respon Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan *defense* negara. Sebagai upaya menahan kemungkinan ancaman terbentuknya Tiongkok sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di regional Indo-Pasifik. Hal ini mengacu oleh apa yang dikatakan oleh Walt (1985) bahwa negara bergabung atau membentuk aliansi untuk melindungi dan menyeimbangkan diri terhadap kekuatan yang lebih unggul dan dapat menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, negara yang membentuk suatu aliansi agar dapat melakukan *balancing*, yang artinya negara bersekutu dalam upaya melawan sumber utama. Amerika Serikat merasa perlu mengimbangi kekuatan untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Upaya *balance of power* yang dilakukan Amerika terhadap Tiongkok melalui AUKUS dapat dikategorikan sebagai peningkatan *external balancing*, yaitu upaya penyeimbang yang mengacu dengan memperkuat dan memperbesar aliansi sebagai tujuan mengecilkan ruang gerak Tiongkok. Bergabungnya ketiga negara tersebut menghasilkan *output* berupa kapal selam tenaga nuklir.

Dalam kerja sama ini terdapat sebuah kesepakatan mengikat yang ditandatangani sebagai bagian dari aliansi AUKUS, yang berlaku sejak 8 Februari 2022, yaitu *Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement* (ENNPIA). ENNPIA digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi tentang propulsi nuklir yang merupakan sistem penggerak kapal selam (The White House, 2022). Setelah munculnya pengumuman kerja sama AUKUS yang menggunakan inisiatif utamanya

membentuk kapal selam dengan tenaga nuklir, menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional. Kekhawatiran ini muncul karena Australia termasuk negara yang menyetujui dan meratifikasi perjanjian *Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT). Sehingga AUKUS sepakat untuk bermitra bersama IAEA (*International Atomic Energy Agency*) untuk memastikan kepatuhan penuh dengan standar yang ada. Negara-negara AUKUS mengumumkan proses konsultasi selama 18 bulan yang akan menentukan perlindungan dan tindakan non-proliferasi dan bagaimana memastikan kepatuhan penuh terhadap komitmen NPT masing-masing pihak sebelum pembangunan kapal selam.

Pada 14 Maret 2023, Director General IAEA, Rafael Mariano Grossi, mengeluarkan pernyataan terkait AUKUS. Dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa Australia telah secara resmi meminta IAEA untuk memulai negosiasi mengenai pengaturan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 14 *Australia's Comprehensive Safeguards Agreement* (CSA). Pasal ini memperbolehkan Australia untuk menggunakan bahan nuklir yang dilindungi berdasarkan CSA. Amerika Serikat dan Inggris juga telah menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga integritas non-proliferasi nuklir dan mematuhi perjanjian pada pasal 14. IAEA juga akan tetap memberikan informasi secara transparan seiring dengan berlanjutnya AUKUS.

Ketiga negara AUKUS mempunyai kewajiban *safeguards* yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian masing-masing negara. Australia sebagai negara *Non-Nuclear-Weapon State* (NNWS) dalam Perjanjian NPT menandatangani CSA dengan IAEA. IAEA akan memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan pengamanan terhadap semua bahan nuklir dalam semua kegiatan nuklir di wilayah Australia, dibawah yurisdiksinya atau dilakukan atas kendalinya di mana pun, dengan tujuan eksklusif untuk memverifikasi bahwa bahan yang digunakan adalah bahan nuklir yang aman bagi manusia, dan tidak

dialihkan menjadi senjata nuklir atau alat peledak nuklir.

Dalam pelaksanaannya, ketiga negara yang tergabung dalam AUKUS telah menyepakati tiga tahapan pelaksanaan proyek AUKUS selama tiga dekade mendatang, meliputi pelatihan, peningkatan kapasitas, akuisisi kapal. Mulai tahun 2023, personil militer dan sipil Australia akan terlibat bersama Angkatan Laut Inggris, Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam membangun kapal selam Inggris dan Amerika Serikat. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada Australia agar dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari kedua mitra tersebut.

Antara tahun 2023-2026, Amerika Serikat dan Inggris berencana meningkatkan kunjungan kapal selam nuklir ke Australia, yang akan membantu dalam membangun kesiapan Australia dalam mengoperasikan kapal selam nuklir. Pada tahun 2027, kapal selam nuklir Inggris dan Amerika Serikat memiliki rencana untuk mendirikan kehadiran rotasional di Australia Barat, memberikan kesempatan bagi personil Australia untuk mendapatkan pengalaman dan pelatihan lebih lanjut dalam pengoperasian kapal selam nuklir. Dilanjutkan dengan Australia mendirikan pangkalan kapal selam di Australia Barat, guna mendukung pengembangan kapabilitas Australia untuk mengoperasikan dan menjaga kapal selam bertenaga nuklir.

Pada awal tahun 2040-an, Australia berencana untuk memberikan kapal selam nuklir SSN-AUKUS pertamanya yang dibangun sendiri (Australia.gov., 2023). tetapi sebelumnya Australia akan mendapatkan tiga kapal selam bertenaga nuklir tipe U.S. Virginia-class dari Amerika yang memiliki kesamaan yang hampir sama dengan kapal selam SSN-AUKUS, termasuk berbagi elemen desain, sistem tempur, dan senjata. Kesamaan dalam desain, komponen, dan kinerja akan membantu dalam transisi ke SSN-AUKUS serupa dengan kapal SSN AUKUS (The White House, 2022).

Kapal SSN AUKUS memiliki keunggulan utama yaitu kemampuannya

untuk beroperasi dengan tingkat deteksi yang lebih rendah oleh pihak lawan. Kecepatan yang dimiliki SSN AUKUS juga jauh melebihi kapal selam bertenaga diesel-elektrik, dengan daya nuklir memungkinkan kapal selam tersebut untuk bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa harus muncul ke permukaan air secara rutin. Selain itu, kapal selam ini dirancang untuk beroperasi di seluruh samudera luas, dengan jangkauan dan daya tahan mereka hanya terbatas oleh kebutuhan untuk mengisi ulang persediaan. Keuntungan ini berarti kapal selam ini tidak perlu mengisi bahan bakar selama masa pakainya, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan patroli lebih lama dan secara efektif memperpanjang waktu yang dapat mereka habiskan di laut (Australia.gov., 2023). Kemitraan AUKUS, akan mendorong Amerika Serikat untuk mendukung pengembangan kapasitas Australia (Tempo.com, 2021). Sebagai bagian dari perjanjian AUKUS, kapal selam bertenaga nuklir akan memungkinkan Angkatan Laut Australia untuk memantau dan melindungi kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan, di mana Tiongkok menjadi lebih tegas di daerah tersebut.

Analisis Balance of Power Amerika Serikat melalui AUKUS

Tiongkok dan Amerika Serikat adalah dua negara yang ingin saling mencapai keseimbangan kekuatan antara satu sama lain. Situasi ini ditandai dengan, perubahan perkembangan polaritas dunia saat ini yang mengarah pada multipolar sistem, Amerika Serikat tidak lagi sebagai satu satunya negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Berkurangnya dominasi Amerika Serikat sejalan dengan perubahan sistem polaritas. Dikutip dari buku "*Politics*" karya Andrew Heywood (2013), menyebutkan meningkatnya multipolaritas dikaitkan dengan beberapa poin, yaitu: (1) kemunduran Amerika, yang pengaruhnya tidak lagi sekuat dahulu; (2) kebangkitan Tiongkok dan negara berkembang lain melalui pesatnya pertumbuhan

perekonomian, yang memungkinkan terbentuknya kekuatan ekonomi global baru. (3) perubahan sifat kekuasaan dan hubungan kekuasaan, memasuki era globalisasi saat ini tidak lagi mengharuskan aktor negara saja yang bisa terlibat dalam perekonomian namun aktor non-negara juga dapat terlibat.

Kebangkitan kekuatan dan pengaruh Tiongkok menjadi satu tanda terciptanya tatanan multipolar khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik memiliki titik strategis utama, yaitu Laut Tiongkok Selatan (LTS). Selain itu, LTS merupakan jalur pelayaran bagi hampir seluruh perdagangan di kawasan ini. Berkembangnya dominasi Tiongkok di LTS menguntungkan dalam hal mengamankan pembangunan dan mengonsolidasikan sentralitasnya di Asia (Raditio, 2019: 77). Tidak hanya bagi Tiongkok, LTS merupakan jalur yang sangat penting bagi jaringan pertahanan dan keamanan AS. LTS sebagai titik strategis utama kawasan Indo-Pasifik yang didalamnya menampung banyak kepentingan negara untuk menjalin kerja sama, keamanan dan perkembangan ekonomi. Tiongkok secara terang terangan meningkatkan kekuatan tentara angkatan laut di LTS, diantaranya melakukan patroli di sekitar pulau Spratly, serta mengadakan latihan dan pembangunan fasilitas militer (Council on Foreign, 2020).

Pada Juli 2020, ketegangan di LTS mulai meningkat, Tiongkok melakukan latihan militer dekat Kepulauan Paracel, sementara Amerika Serikat juga terus memperluas operasi militernya dengan negara-negara di sekitar LTS dengan melakukan latihan militer di wilayah yang berdekatan dan mengerahkan dua pesawat, kapal induk (USS Nimitz dan USS Ronald Reagan) guna menunjukkan keberadaan militernya. Keadaan ini menyebabkan kedua negara saling menuduh dan menyalahkan satu sama lain mengenai siapa yang memicu ketegangan (CNBC, 2020). Kedua negara juga

berusaha untuk menerapkan peraturan yang dinilai dapat menurunkan intensitas kekuatan antara satu sama lain, AS tertarik untuk mengamankan tatanan berbasis aturan di kawasan. Untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika dan menekan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan, untuk kawasan LTS AS menerapkan kebijakan *Freedom of Navigasi* (FON). FON merupakan kebijakan yang menegakkan hak dan kebebasan navigasi di perairan internasional, yang tujuannya menolak klaim wilayah maritim yang berlebihan dari negara lain dan memastikan kapal AS dapat berlayar secara bebas di perairan internasional sesuai hukum UNCLOS. LTS perlu memiliki kebijakan kebebasan berlayar di kawasan (IP Defense Forum, 2021), untuk mendukung perdagangan tanpa hambatan dan mobilitas kekuatan militer global. Sedangkan Tiongkok menerapkan aturan di kawasan LTS untuk setiap kapal selam, kapal bertenaga nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, kimia dan zat berbahaya wajib melaporkan posisi pada kepala administrasi keselamatan maritim Tiongkok. Setiap kapal yang dianggap membahayakan lalu lintas maritim Tiongkok juga akan diminta melaporkan datanya, seperti nama, tanda panggilan, posisi sekarang, dan perkiraan waktu kedatangan. Pemerintah Tiongkok juga akan mengambil sikap tegas jika kapal tersebut mengancam keamanan (Kompas.com, 2021).

Terdapat dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam konsep *balance of power*. Pertama perimbangan kekuatan. Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini berusaha saling melakukan perimbangan kekuatan. Dalam *economic power*, pengaruh suatu negara dalam urusan internasional terkait erat dengan kekayaan dan sumber daya ekonominya. Hal ini terjadi karena pembangunan ekonomi dapat berimplikasi pada penyokongan kapabilitas militer, yang artinya jika memiliki kekuatan

sumber daya ekonomi dan kekayaan yang mumpuni memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan dan memodernisasi angkatan bersenjata. Khususnya di Indo-Pasifik, Tiongkok berhasil meningkatkan kekuatan ekonomi dengan menguasai perdagangan.

Transformasi kekuatan ekonomi yang dibangun Tiongkok memberikan peluang dan tantangan pada negara di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok telah menjadi sumber impor utama bagi semua negara Indo-Pacific Economic Forum (IPEF), kecuali Brunei. Sekaligus sebagai negara tujuan ekspor utama bagi separuh negara IPEF. Australia, Indonesia, Filipina memiliki ketergantungan tinggi pada perdagangan dengan Tiongkok. BRI dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) menjadi kontributor dari berkembangnya hubungan kerja sama ekonomi kawasan Indo-Pasifik dan Tiongkok.

Tiongkok dinilai juga turut mendorong pergerakan ekonomi dunia (World Bank, 2018). Sedangkan Amerika Serikat berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensinya di kawasan Indo-Pasifik. Amerika berusaha membendung perluasan kekuatan Tiongkok melalui kebijakan *Pivot to Asia*. Amerika mempercepat prioritasnya terhadap kawasan ini secara signifikan dengan menginvestasikan sumber daya diplomasi, ekonomi, dan mengakui Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi dunia.

Pada tahun 2017, strategi *America First toward Indo-Pacific* menjadi strategi utama Amerika di Indo-Pasifik, dengan memfokuskan kebijakannya dalam *new security architecture dan economic strengthening* (Harding, 2019). Kebijakan ini digunakan untuk menghadapi sengketa LTS dengan tetap mengupayakan FON. Sedangkan *economic strengthening* ditujukan Amerika dalam menghadapi BRI yang menjadi proyek terbesar Tiongkok.

Kedua, perimbangan kekuatan melalui *military power*. Membandingkan kekuatan militer antara Tiongkok dan Amerika dari segi anggaran jelas jauh berbeda. Anggaran belanja militer tahun 2022, Amerika Serikat berada di peringkat pertama dengan jumlah USD 877 miliar yang didedikasikan untuk militer. Sedangkan Tiongkok berada di peringkat kedua, menyumbang 13% dari pengeluaran militer dunia sebesar USD 292 miliar.

Tabel 1. Perbandingan jumlah kekuatan militer

No	Keterangan	Amerika Serikat	Tiongkok
1	Anggaran Militer	Menduduki peringkat teratas dengan anggaran terbesar di dunia	Anggaran militer terbesar kedua di dunia
2	Personel Militer	Total personel: 1,8 juta Pasukan Aktif : 1,39 juta Pasukan Cadangan : 442 ribu	Total personel: 3,1 juta Pasukan Aktif : 2 juta Pasukan Cadangan : 510 ribu
3	Angkatan Udara	Total pesawat : 13.247	Total pesawat : 3.285
4	Angkatan Darat	Total tank: 6.612	Total tank: 5.250
5	Angkatan Laut	Total aset: 484 Kapal perang: 200 Kapal selam: 200 Kapal induk: 11	Total aset: 777 Kapal perang: 49 Kapal Selam: 68 Kapal Induk: 2

Sumber : CNN Indonesia, 2022

Posisi anggaran militer Tiongkok sebagai terbesar kedua di dunia, memungkinkan negara tersebut untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanannya. Kebijakan dan segala bentuk tindakan yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok berusaha untuk saling melakukan perimbangan kekuatan untuk bisa menguasai dan menunjukkan kekuatannya di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karenanya, AUKUS menjadi respon Amerika Serikat untuk membendung peningkatan pengaruh Tiongkok. Keadaan ini dapat dikatakan sebagai upaya *balancing* Amerika di kawasan Indo-Pasifik terhadap Tiongkok. Kemitraan AUKUS memberikan beberapa manfaat dan hasil bagi Amerika Serikat, antara lain:

A. Memperkuat kekuatan militer, AUKUS memberi Amerika Serikat peluang untuk

memperkuat kekuatan militernya, menambah pilihan untuk dukungan dan keberlanjutan logistik, dan lapangan platform militer berupa pelatihan kerja sama yang dapat dioperasikan ketiga negara.

- B. Dengan memberi Australia kemampuan kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional, terdapat rencana pembuatan pangkalan kapal selam baru yang akan didirikan di Australia Barat sebagai bagian dari perjanjian AUKUS, yaitu di HMAS Stirling. Pangkalan ini akan menampung kapal selam Amerika dan Inggris secara bergilir, dengan kapal selam pertama diperkirakan akan beroperasi di tahun 2030. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menekan perkembangan kekuatan militer Tiongkok di sekitar LTS, sehingga memungkinkan kapal selam sekutu menghabiskan lebih banyak waktu beroperasi di sekitar LTS, sehingga meningkatkan jangkauan dan kehadiran mereka di wilayah tersebut. Pembentukan pangkalan ini merupakan perkembangan signifikan dalam kemitraan AUKUS dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan keamanan dan pertahanan. Selain itu situasi ini memungkinkan AS memanfaatkan kemampuan dan sumber daya sekutunya, yaitu Australia dan Inggris untuk memproyeksikan kekuatannya secara lebih efektif.
- C. AUKUS berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan antarnegara di kawasan Indo-Pasifik dan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat sistem internasional yang didasarkan pada multilateralisme, menjalin aliansi dan kemitraan dengan cara yang saling memperkuat dalam berbagai permasalahan.
- D. Kemitraan AUKUS memperkuat basis Industri kapal selam Amerika Serikat. Hal ini dengan cara meningkatkan tenaga kerja industri dan memperluas rantai pasokan

kapal selam yang berkontribusi terhadap *free-open Indo-Pacific* (FOIP), yaitu peningkatan keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik yang berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan negara-negara di Indo-Pasifik dengan memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

- E. Berbagi *advanced technology*. Kemitraan ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mengakses dan berbagi teknologi canggih, seperti desain kapal selam mutakhir, kemampuan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kemampuan bawah laut. dengan sekutu-sekutunya.

Poin-poin di atas mencerminkan perspektif Amerika Serikat mengenai implikasi strategis, militer, dan industri dari kemitraan AUKUS, serta perannya dalam menanggapi tantangan keamanan regional, khususnya yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Amerika Serikat berusaha untuk mengembangkan kekuatan militernya dengan menggandeng Australia dan Inggris, sebagai sekutu yang memiliki posisi strategis berdasarkan kedekatan geografis titik strategis utama di kawasan Indo-Pasifik. Inggris dianggap sebagai negara yang mampu untuk membantu Amerika Serikat memiliki kekuatan teknologi tingkat tinggi sektor militer di kawasan Indo-Pasifik. Sedangkan Australia adalah negara yang akan menerima objek hasil kerja sama atas sumber informasi yang diolah bersama untuk kepentingan masing-masing negara (Australia Parliament House, 2021).

Upaya *balancing* yang dilakukan Amerika Serikat dapat diartikan sebagai cara suatu negara mempertahankan kekuatannya diantara munculnya kekuatan-kekuatan besar baru. Menurut kaum realis, perimbangan kekuatan merupakan suatu tujuan politik yang bernilai untuk memajukan keamanan nasional dan menegakkan ketertiban. Upaya Pembentukan AUKUS yang dilakukan Amerika Serikat sebagai upaya meningkatkan kehadiran dan peran untuk membantu perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Pernyataan Kenneth Waltz (1978) dalam *"Theory Of International Politic"* menyebutkan bahwa negara adalah aktor *balance of power*. Oleh karenanya negara dapat bertindak dan menggunakan berbagai cara untuk melindungi serta mencapai tujuannya. Situasi AS di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bagaimana suatu negara berperan dalam mencapai tujuannya. Amerika telah berusaha untuk menunjukkan kehadirannya melalui (1) penggabungan Hawaii dan Guam dengan AS tahun 1898. Hawaii menjadi pintu gerbang AS menuju Indo-Pasifik. Posisi strategis menjadikan Hawaii sebagai titik berkumpulnya pasukan militer INDOPACOM (US Indo-Pacific Command). Sedangkan Guam sebagai "ujung tombak" bagi kekuatan AS; (2) meningkatnya pergerakan militer AS di kawasan LTS sejak 2018 dengan diadakannya latihan Freedom of Navigation (FON) yang sengaja dilakukan dalam jarak 12 mil dari pulau-pulau buatan Tiongkok; (3) AS menempatkan *Logistic Group West Pacific*, sebuah fasilitas berlabuh kapal induk khusus, pengerahan kapal perang tempur pesisir, dan pengerahan pesawat reguler di Singapura semakin memungkinkan proyeksi AS ke Samudera Hindia Timur dan LTS; (4) pertemuan dialog kebijakan keamanan strategis AS-Singapura pada April 2018 menekankan "kerja sama pertahanan timbal balik" yang berfokus pada keamanan maritim di kawasan untuk menjunjung FOIP; (5) peningkatan kekuatan militer antara AS-Australia menjadi berjumlah 2.500 pada bulan Juli 2019. AS bergerak juga membangun fasilitas angkatan laut baru di timur laut Darwin di Glyde Point.

Waltz (1978) juga menyebutkan terdapat dua jenis *balancing*, yaitu *external* dan *internal balancing*. Dalam penyeimbangan eksternal, penyeimbangan ini mengacu pada upaya menghadapi ancaman dengan mengandalkan sumber daya eksternal dengan menjalin, memperkuat dan memperbesar aliansi sebagai tujuan melemahkan serta mengecilkan aliansi lawan. AUKUS dikategorikan sebagai *external balancing* Amerika Serikat melalui kemitraan bilateral

dengan negara-negara di seluruh Indo-Pasifik yang memiliki kepentingan keamanan yang sama. Aliansi antara Amerika Serikat, Inggris dengan Australia akan terus mendukung tujuan keamanan AS di Indo-Pasifik yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan Tiongkok.

Negara akan melakukan *balancing* terhadap negara ancaman. Pasalnya keamanan negara adalah tujuan tertinggi bagi negara. Jika keamanan negara terjamin maka negara dapat dengan aman mencari dan mencapai ketegangan, keuntungan dan kekuasaan. Setiap negara menghadapi ancaman dari negara lain karena sistem yang anarki, namun pada kenyataannya faktor jarak geografi, pengalaman historis, faktor ideologi, dan SARA dapat membentuk potensi ancaman.

Penyeimbangan eksternal yang dilakukan Amerika dipengaruhi oleh polaritas. Multipolar sistem yang terjadi saat ini membuat perilaku setiap negara menjadi relatif tidak pasti. Kemungkinan munculnya ancaman dari negara yang memiliki kemampuan militer dan kekuatan ekonomi yang serupa dalam sistem. Dalam multipolar, sistem polaritas tidak cukup menjadi acuan utama untuk memprediksi tindakan *balancing* apa yang dilakukan negara, probabilitas penyeimbangan internal dan eksternal hampir sama. Situasi dunia yang anarkis, keamanan individu dijamin oleh dirinya sendiri, membuat negara menggunakan pendekatan eksternal dengan meningkatkan kekuatan relatif untuk menjaga keamanan.

Mengutip Martin Wight (2009) dalam *"Diplomatic Investigation Essay in The Theory of International Politic,"* dijabarkan terdapat sembilan pemaknaan *Balance of Power*, antara lain: **Pertama**, *an even distribution of power* (distribusi kekuasaan) *balance of power* mengacu pada distribusi kekuasaan yang seimbang diantara negara atau kawasan. Ada dua jenis distribusi kekuatan, yaitu *Multiple Balance* (keseimbangan ganda) jika ada tiga atau lebih pihak yang seimbang, dan *Simple Balance* (keseimbangan sederhana) jika hanya ada dua pihak yang seimbang. Situasi saat ini di Indo-

Pasifik menunjukkan pembentukan *multiple balance* dengan melibatkan tiga kekuatan utama, AUKUS untuk mengimbangi Tiongkok.

Kedua, *The principle that power ought to be evenly distributed* (prinsip bahwa kekuasaan harus didistribusikan secara merata). Ide bahwa keseimbangan bermanfaat dan kekuasaan harus didistribusikan secara merata untuk mencegah dominasi yang berlebihan. Upaya seperti AUKUS dianggap sebagai langkah untuk menjaga distribusi kekuasaan yang merata di kawasan Indo-Pasifik. **Ketiga**, *the existing distribution of power* (distribusi kekuasaan yang sudah ada) merujuk pada situasi politik saat ini. Negara akan berupaya untuk merespon dan mempertahankan distribusi kekuasaan yang sudah ada, seperti yang tercermin dalam upaya AUKUS untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Indo-Pasifik.

Keempat, *the principle of equal aggrandizement of the Great Powers at the expense of the weak* (prinsip pemerataan kekuatan negara-negara besar dengan mengorbankan negara-negara lemah). Prinsip ini menyoroti kecenderungan beberapa negara untuk memperluas kekuasaan mereka dengan mengorbankan negara-negara lemah. Sampai pada tahapan ini upaya *balance* melalui AUKUS menunjukkan terjadinya pengorbanan dari Australia sebagai negara anggota AUKUS. Posisi Australia sebagai penerima kekuatan militer dan negara yang meratifikasi NPTA (Non-Proliferation Treaty Agreement). Sebagai negara yang menandatangani NPT, Australia berkomitmen untuk tidak memproduksi, memiliki, atau mentransfer senjata nuklir, serta untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk keperluan damai. Namun pada situasi saat ini, Australia tidak mematuhi perjanjian yang telah diratifikasinya, sehingga dapat dikatakan Australia mengorbankan kepentingan negara yang awalnya tidak akan menggunakan nuklir menjadi memiliki rencana pembentukan kapal selam nuklir.

Kelima, *the principle that my side ought to have a margin of strength, in order to avert the danger of power becoming unevenly distributed*

(prinsip bahwa satu sisi harus memiliki margin kekuatan untuk mencegah bahaya distribusi kekuasaan yang tidak merata). Untuk mencegah distribusi kekuasaan yang tidak merata, suatu sisi harus memiliki kelebihan kekuatan, seperti yang diupayakan oleh Amerika Serikat melalui AUKUS dalam mengimbangi Tiongkok di Indo-Pasifik. **Keenam** adalah *possessing a special role in maintaining an even distribution of power* (memiliki peran khusus dalam menjaga pemerataan kekuasaan). Negara-negara memiliki tanggung jawab khusus dalam menjaga distribusi kekuasaan yang merata, seperti yang tercermin dalam peran Amerika dalam pembentukan AUKUS untuk mengondisikan kekuatan di Indo-Pasifik.

Ketujuh, *possessing a special advantage in the existing distribution of power* (kepemilikan keunggulan khusus dalam distribusi kekuasaan yang ada). Fleksibelnya istilah 'keseimbangan kekuasaan' bahkan digunakan untuk menyampaikan kebalikan dari makna tradisionalnya dan digunakan untuk menggambarkan kepemilikan dominasi. Jika AS berhasil meningkatkan dominasinya melalui AUKUS, aliansi ini akan menjadi gambaran bahwa AS memiliki dominasi di kawasan Indo-Pasifik. Posisi ini akan secara tidak langsung membentuk peran Amerika sebagai pemerata kekuasaan.

Kedelapan, *possessing predominance* (memiliki dominasi). Pembentukan AUKUS juga dapat diinterpretasikan sebagai langkah menuju dominasi atau keunggulan di Indo-Pasifik, terutama melawan pengaruh Tiongkok. **Kesembilan**, yaitu *an inherent tendency of international politics to produce an even distribution of power* (kecenderungan yang melekat dalam politik internasional untuk menghasilkan distribusi kekuasaan yang merata), hal ini menegaskan sebuah hukum politik internasional yang mendasari dan memperkuat prinsip keseimbangan kekuasaan dalam pengertian kekuasaan harus didistribusikan secara merata sehingga jika kekuatan mengabaikan prinsip, hukum akan terlihat bekerja untuk mengesampingkannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Trilateral Defence Partnership AUKUS merupakan perjanjian kerja sama keamanan antara tiga negara, yaitu Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian ini disebut sebagai Pakta AUKUS yang dibentuk Amerika Serikat bersama sekutunya untuk mempertahankan dominasi di kawasan Indo-Pasifik. Amerika berusaha menekan peningkatan kekuatan Tiongkok di kawasan ini dengan memberikan peluang peningkatan kerja sama aliansi, sehingga memungkinkan melakukan kerja sama keamanan yang lebih luas antara ketiga negara. AUKUS membantu AS untuk meningkatkan kemampuannya di sektor militer bersama dukungan sekutunya dengan menyediakan kemampuan militer gabungan yang canggih dapat menjadi satu kekuatan untuk meningkatkan keamanan. Upaya AS untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok melalui AUKUS menghasilkan; (1) pembuatan kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi yang modern yang dikembangkan dengan oleh Inggris dan AS; (2) peningkatan fokus strategis dan kehadiran regional Amerika Serikat di Indo-Pasifik; (3) peluang AS untuk berbagi teknologi dan kemampuan militer canggih dengan Australia dan Inggris, sehingga mendorong kerja sama industri pertahanan dan inter-operabilitas yang lebih erat di antara ketiga negara, termasuk pengembangan kemampuan siber, kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, dan kemampuan bawah laut; (4) rencana pangkalan militer baru yang akan didirikan di Australia Barat sebagai bagian dari perjanjian AUKUS. Pangkalan ini akan menampung kapal selam Amerika dan Inggris secara bergilir, dengan kapal selam pertama diperkirakan akan beroperasi di Australia Barat pada tahun 2030. Upaya *balancing* yang dilakukan AS terhadap Tiongkok dikategorikan sebagai *External Balancing* dengan mengembangkan aliansi sebagai upaya pengembangan kekuatan bersama sekutu yang memiliki tujuan yang sama. AUKUS menjadi jawaban hasil dari *Balance of power* AS terhadap

peningkatan kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal

- Butterfield, H., & Wight, M. (1966). Diplomatic investigations: Essays in the theory of international politics.
- Heywood, A. (2013). *Global politics*. Palgrave Macmillan Publishing.
- Sorensen, R. J. (2013). *Introduction to International Relation, fifth edition*. Oxford University Press Inc.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politic*. New York: McGraw Hill.
- Cooper III, C. A., & Chase, M. S. (2020). *Regional Responses to US-China Competition in the Indo-Pacific*. Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-4412/5-AF.
- Deb, S., & Wilson, N. (2021). The coming of quad and the balance of power in the Indo-Pacific. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 4(9), 111-121.
- Harding, B. (2019). The Trump administration's free and open Indo-Pacific approach. *Southeast Asian Affairs*, 2019(1), 61-67.
- Lee, W. C. (2008). Long shot and short hit: China as a military power and its implications for the USA and Taiwan. *Journal of Asian and African Studies*, 43(5), 523-542.
- Pradana, M. E. (2022). Politik Luar Negeri Tiongkok Sejak Tahun 1978: Transisi, Rebalancing dan Aktivisme. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 1-14.
- Purwanto, A. J. (2010). Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya terhadap Keamanan di Asia Timur. *Spektrum*, 7(1).
- Syahrin, M. N. (2018). China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan . *Global & Strategis*.
- The House of Commons Library. 2021 The AUKUS agreement. UK Parliament
- Türkcan, M. L. (2022). *AUKUS and the Return of Balance of Power Politics*. TRT Word Research Center.
- Ulum, A.B., & Windiani.R. (2023). Gejolak Indo-Pasifik: Analisa Kebijakan Australia Dalam

Merespon Ancaman Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*

- Vo, H., Nguyen, B., Tran, H., & Bui, T. (2023). US-China rivalry in Southeast Asia region: a study on the South China Sea case. *Journal of Liberty and International Affairs*, 9(1), 336-351.
- Walt, S.M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9, 3 - 43.
- Wende, A. (2022). EMERGENCE OF AUKUS PACT AS A REGIONAL BLOC AND ITS IMPLICATIONS IN ASIA. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Wijaya, S., Widjayanto, J., & Nuriada, W. (2022). China's military presence in the South China Sea and the AUKUS alliance on Indonesia's defense strategy: A review of the land defence aspects. *Strategi Perang Semesta*, 8(1), 69-82.

Media Massa

- Australia.gov. AUKUS Nuclear-Power Submarine Pathway. Diakses pada 10 Desember 2023 dari <https://www.asa.gov.au/aukus>
- Council on Foreign Relations. 2 Mei 2020. Rising Tensions in the South China Sea. Diakses pada 5 September 2023 <https://www.cfr.org/blog/rising-tensions-south-china-sea>
- CNN. 6 Fakta soal Kapal Selam Nuklir AUKUS yang Bikin RI Khawatir. Diakses 5 Juli 2023 dari
- GOV. UK, 15 September 2021. UK, US AND Australia launch new security partnership Diakses pada 5 Juli 2023 dari <https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership>
- Global Fire Power, 2023, 2023 Military Strength Ranking, GFP Annual Ranking. Diakses pada <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>
- International Atomic Energy Agency (IAEA) 14 Maret 2023. Director General Statement in Relation to AUKUS Announcement. Diakses pada 5 September 2023 <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/director-general-statement-in-relation-to-aukus-announcement>
- Indonesia Defence. 2 Maret 2023. Intelijen AS Temukan Pembangunan Pangkalan Laut Cina di Kamboja. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023 dari

<https://indonesiadefense.com/intelijen-as-temukan-pembangunan-pangkalan-laut-cina-di-kamboja/>

Kompas. 3 September 2021. China Buat Aturan Sendiri di Laut China Selatan, Kapal Masuk Harus Laporkan. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 dari <https://kmp.im/app6https://www.kompas.com/global/read/2021/09/03/092444170/china-buat-aturan-sendiri-di-laut-china-selatan-kapal-masuk-harus-lapor>

Jurnalpost.com. 12 Juni 2023. Pengaruh Amerika Serikat yang Semakin Menurun di Era Presiden Joe Biden. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023 dari <https://jurnalpost.com/pengaruh-amerika-serikat-yang-semakin-menurun-di-era-presiden-joe-biden/53197/>

Tempo.co. 17 September 2021. Mengenal AUKUS, Pakta Trisula untuk Memperkuat Militer Australia di Indo-Pasifik. Diakses pada tanggal 1 juli 2023 dari https://dunia.tempo.co/read/1507135/mengenal-aukus-pakta-trisula-untuk-memperkuat-militer-australia-di-indo-pasifik?page_num=4

The White House. FACT SHEET: Implementation of the Australia-United Kingdom- United State (AUKUS).Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/05/fact-sheet-implementation-of-the-australia-united-kingdom-united-states-partnership-aukus/>

Politico. 15 September 2021. Biden announces joint deal with U.K. and Australia to counter China. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 dari <https://www.politico.com/news/2021/09/15/biden-deal-uk-australia-defense-tech-sharing-511877>